



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang

- a. bahwa belanja daerah selain urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja yang digunakan untuk penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja, perlu dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah diatur dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2018 dan telah efektif dilaksanakan;
- d. bahwa dengan adanya perubahan pada Indeks Kinerja Organisasi dipandang perlu menetapkan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Wilayah adalah Wilayah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
7. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pringsewu.

9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
10. Program adalah bentuk instrumen penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
11. Kegiatan adalah bagian Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
17. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.

18. Belanja tetap adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan/atau target kinerja suatu kegiatan.
19. Belanja variabel adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah dengan sesuai perubahan volume atau target kinerja suatu kegiatan.
20. Rumusan ASB adalah rumus yang dipergunakan dalam perhitungan besaran belanja total suatu kegiatan, merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variabel cost*.
21. Nilai minimal adalah nilai dengan batasan terendah dari objek belanja yang diperkenankan oleh setiap Analisis Standar Belanja.
22. Nilai ideal adalah nilai yang disarankan oleh setiap objek belanja yang terdapat dalam Analisis Standar Belanja.
23. Nilai maksimal adalah nilai dengan batasan tertinggi dari objek belanja yang terdapat dalam Analisis Standar Belanja.
24. Nilai Opsional adalah nilai yang bersifat pilihan/bukan keharusan yang dianggarkan sesuai kebutuhan dan atas seijin TAPD.
25. Satuan Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT ASB

Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

Penetapan Analisis Standar Belanja bertujuan:

- a. untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan OPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan;

- b. memberikan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS;
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

Pasal 4

Manfaat Analisis Standar Belanja adalah:

- a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomis dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan setiap OPD.
- b. sebagai standar penyusunan plafon anggaran tiap-tiap OPD, fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA PPAS; dan
- c. sebagai standar oleh fungsi penyusunan anggaran (RKA-SKPD) tiap-tiap perangkat daerah, Dokumen ASB berguna bagi pedoman dalam menyusun anggaran sehingga OPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah.

BAB III MUATAN ASB

Pasal 5

- (1) Muatan ASB terdiri dari definisi, rumusan ASB dan alokasi obyek belanja.
- (2) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan jenis ASB.

Pasal 6

Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan ASB meliputi:

- a. bimbingan teknis dengan sewa gedung;
- b. bimbingan teknis dengan tidak sewa gedung;

- c. sosialisasi dengan sewa gedung;
- d. sosialisasi dengan tidak sewa gedung; dan
- e. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.

Pasal 7

- (1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Rumusan ASB.
- (3) Penggunaan Rumusan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Persamaan penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang sudah ada.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- c. sosialisasi dengan sewa gedung;
- d. sosialisasi dengan tidak sewa gedung; dan
- e. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.

Pasal 7

- (1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Rumusan ASB.
- (3) Penggunaan Rumusan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Persamaan penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang sudah ada.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 16 April 2020
BUPATI PRINGSEWU.

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 16 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 553

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

ASB001 Penyediaan Jasa Surat-menyurat

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan seluruh kegiatan surat menyurat dimulai dari menyusun rancangan surat sampai dengan tersampainya surat yang dimaksud dan membalas surat yang diterima serta mendokumentasikannya atau mengarsipkannya jika diperlukan.

Seiring dengan perkembangan jaman, surat-menyurat dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik, yang dimaksud manual adalah surat-menyurat dalam pembuatan surat/balasan surat berbentuk fisik dari bentuk kertas, pengiriman surat yang dilakukan dengan mobilitas orang dan barang, dan pengarsipannya yang dilakukan dengan menggunakan kerja, alat fisik, dan pengamanan fisik.

Sejauh ini batasan ASB di sini masih menggunakan definisi jasa surat-menyurat dalam bentuk manual. Dengan demikian kegiatan ini memiliki sifat kegiatan manual, dan karakter kegiatannya sebagaimana dicantumkan dalam *driver* dan alokasi belanja juga mencerminkan kegiatan manual.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)
= Penyesuai Tarif x (Rp. 240.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Besaran indeks kinerja organisasi adalah indeks relatif sesuai beban kerja organisasi yang bersangkutan. Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas batasan indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Kantor	0,00%	67,00%	100,00%
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	33,00%	100,00%

ASB002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi dan memfasilitasi kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan sumber daya listrik yang diperlukan oleh organisasi untuk melaksanakan operasi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat tiga komponen utama yang dicakup dalam kegiatan yang dinaungi ASB ini yaitu: komunikasi, sumber daya air, dan listrik. Komunikasi diperlukan untuk menjalin hubungan dan menyalurkan informasi. Sumber daya air diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi, menjaga kebersihan dan mencukupi kebutuhan minum secara umum. Kebutuhan minum secara khusus yang melibatkan pembelian minum langsung tidak tercakup dalam sumber daya air ini. Listrik diperlukan untuk penerangan utama dan pengoperasian alat utama yang digunakan dalam organisasi.

2

Beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ini dilarang atau tidak diperkenankan. Termasuk yang dilarang/tidak diperkenankan adalah: penggunaan jasa komunikasi untuk memfasilitasi pihak lain yang tidak memberikan manfaat bagi organisasi, pengalokasian sumber daya air untuk mendukung berbagai aktivitas di luar fungsi utama organisasi, penggunaan listrik untuk penerangan dengan keperluan lain, atau penggunaan listrik untuk pengoperasian alat lain di luar kebutuhan organisasi.

Perhitungan belanja dilakukan dengan menghitung kebutuhan masing-masing ketiga komponen di atas menggunakan dasar beban kerja yang sesuai. Setelah diperoleh, maka hasil ketiganya dijumlahkan untuk mendapatkan keseluruhan belanja yang diperlukan. Dalam hal pertimbangan belanja sumber daya air lebih tinggi daripada belanja sumber daya air yang diupayakan dengan sumber daya listrik, diperkenankan menggeser alokasi belanja tersebut kepada belanja sumber daya listrik.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$
 $= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 4.800.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$

Besaran indeks kinerja organisasi adalah indeks relatif sesuai beban kerja organisasi yang bersangkutan. Indeks spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja seluruhnya didistribusikan dalam kategori Belanja Jasa Kantor.

ASB003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi kesiapgunaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk mendukung kebutuhan operasi kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama, sehingga jasa peralatan kantor juga cukup beragam untuk dikaitkan dengan peralatan kantor yang beragam tersebut.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$
 $= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.500.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$

Besaran indeks kinerja organisasi adalah indeks relatif sesuai beban kerja organisasi yang bersangkutan. Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	8,43%	16,15%
Belanja Jasa Kantor, Berbagai Sewa dan Transportasi	83,85%	91,57%	100,00%

ASB004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.

Rumus Belanja : Tarif x Nilai Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Bersih yang ditentukan/ditagihkan)
= 100% x Nilai Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Bersih yang ditentukan/ditagihkan

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja jasa kantor.

ASB005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.

Rumus Belanja : Tarif x Nilai Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Bersih yang ditentukan/ditagihkan)
= 100% x Nilai Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Bersih yang ditentukan/ditagihkan

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja premi asuransi.

ASB006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional milik daerah.

Rumus Belanja : Tarif x Nilai Jasa Jaminan Kendaraan Dinas/Operasional Milik Daerah Bersih yang ditentukan/ditagihkan)
= 100% x Nilai Jasa Jaminan Kendaraan Dinas/Operasional Milik Daerah Bersih yang Ditetentukan/ditagihkan

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja perawatan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

ASB007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan administrasi keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 52.275.000 \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$

Indeks maksimal kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS, Non PNS dan Lembur	97,10%	98,54%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,16%	0,33%
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	0,34%	0,68%
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi	0,01%	0,96%	1,90%

ASB008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan kebersihan kantor. Kantor sebagaimana dimaksud dalam definisi ini adalah kantor yang berarti tempat bekerja para pegawai organisasi tersebut. Berbagai gedung atau aset daerah lainnya yang menjadi kewenangan suatu organisasi bukan bagian dari kegiatan ini.

Untuk organisasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau asetnya mencakup definisi yang lebih luas dari pada yang ditegaskan diatas, cakupan diatas bisa diperluas. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak atau aset yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari jasa kebersihan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times \text{Rp. } (1.325.000 \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	96,59%	98,28%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	1,72%	3,41%

ASB009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja khusus untuk melaksanakan perbaikan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau menopang aktivitas utama pelayanan masyarakat.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)
= Penyesuai Tarif x Rp. (4.500.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Kantor	92,41%	96,13%	100,00%
Belanja Pemeliharaan	0,00%	6,30%	12,20%

ASB010 Penyediaan Alat Tulis kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan alat tulis kantor yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memproduksi output fisik yang komponen dasarnya adalah alat tulis kantor maka diperkenankan mengalokasikan belanja alat tulis kantor. Mekanisme ini harus dituangkan dalam kegiatan tersendiri berkarakter produksi output fisik yang dimaksud. Jika tidak dituangkan dalam kegiatan tersendiri, maka kebutuhan tersebut dapat dihitung tersendiri dan ditambahkan dalam nilai kegiatan ini.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)
= Penyesuai Tarif x (Rp. 6.310.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Besaran indeks kinerja organisasi adalah indeks relatif sesuai beban kerja organisasi yang bersangkutan. Indeks spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Semua belanja didistribusikan dalam Belanja Bahan Pakai Habis.

ASB011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan barang/bahan cetakan dan penggandaan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cakupan utama sebenarnya adalah organisasi sendiri. Perluasan

cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks kinerja Organisasi})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 4.000.000} \times \text{Indeks kinerja Organisasi})$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,82%	9,03%	17,25%
Belanja Cetak/ Penggandaan/ Dokumentasi	82,75%	90,97%	99,18%

ASB012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi dan memfasilitasi ketersediaan komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor. Sesuai dengan namanya, komponen atau instalasi yang diniatkan untuk diadakan adalah yang berkaitan dengan penerangan bangunan kantor.

Terdapat dua unsur di dalam kalimat diatas yang perlu ditandai yaitu: komponen listrik penerangan bangunan kantor, dan instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Komponen dimaksudkan sebagai barang yang suatu saat bila rusak bisa diganti. Instalasi dimaksudkan sebagai peralatan yang bila suatu saat rusak akan diperbaiki kecuali ditujukan untuk diganti seluruhnya. Penggantian sebagian dikategorikan sebagai perbaikan/perawatan sedangkan penggantian seluruhnya dikategorikan sebagai penyediaan. Yang dicakup dalam ASB ini adalah kebutuhan atas komponen instalasi. Dengan demikian, instalasinya sendiri tidak dimasukkan dalam kategori ASB ini. ASB yang lebih tepat untuk instalasi adalah ASB berkaitan dengan pengadaan atau perawatan mengingat bahwa instalasi jika diadakan akan dikonversi menjadi aset tetap sedangkan pengeluaran untuk perawatan dimasukkan dalam belanja operasional atau sejenisnya. Berbeda dengan definisi ASB sebelumnya tentang penyediaan jasa listrik, maka yang dicakup di sisi adalah berkaitan dengan komponennya dan cadangan untuk penggantian atas kerusakannya.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.469.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

✓

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	96,85%	98,41%	100,00%
Belanja Pemeliharaan	0,00%	1,59%	3,15%

ASB013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk mendukung kebutuhan operasi kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Organisasi})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 5.000.000} \times \text{Indeks Organisasi})$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan/Material dan Bahan Pakai Habis	0,00%	23,55%	100,00%
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	36,45%	100,00%
Belanja Modal Peralatan Kantor	0,00%	40,00%	100,00%

ASB014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan peralatan rumah tangga untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang dimaksud bisa berupa gelas, piring, atau lainnya sebagai bagian kebutuhan dapur, atau ember, tangga, selang air sebagai bagian dari kebutuhan rumah tangga.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 71.960.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Semua belanja didistribusikan dalam Belanja Bahan/Material.

ASB015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk menyediakan bahan bacaan utama yang mendukung kelancaran informasi dalam organisasi dan menyediakan sarana rujukan/informasi peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh suatu organisasi. Bacaan yang sifatnya hiburan tidak termasuk di dalam cakupan ini. Pengadaan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dimatikan untuk dihibahkan juga tidak termasuk dalam cakupan definisi ini.

Untuk organisasi yang bertugas memberikan pengetahuan kepada masyarakat, cakupan di atas bisa diperluas. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari pengadaan bacaan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)

$$= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 4.500.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi dan Jasa kantor	99,78%	99,89%	100,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00%	0,11%	0,22%

ASB016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk ketersediaan logistik karena harus melayani pegawai yang cukup banyak. Penggunaanya biasanya adalah organisasi dengan karakter khusus yang membutuhkan ketersediaan logistik selain yang telah terakomodasi dalam belanja makanan dan minuman.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)

$$= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 810.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$$

✓

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ material	93,78%	96,84%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	3,16%	6,22%

ASB017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai penunjang kelancaran operasi organisasi. Makanan dan minuman yang dicakup di sini adalah makanan dan minuman yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional yang berlaku di kantor tersebut. Belanja kegiatan ini juga mencakup kebutuhan untuk rapat reguler yang terjadi dalam kantor organisasi yang bersangkutan.

Atas organisasi yang memiliki kepentingan untuk memberikan perlakuan khusus untuk tamu dan rapat khusus yang melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat dijangkau dengan kegiatan ini, maka kebutuhan makanan dan minuman dapat diperhitungkan tersendiri dengan mencantumkan frekuensi, pihak khusus yang terlibat, jenis rapat yang diselenggarakan dan durasi yang dibutuhkan. Belanja yang dibutuhkan dapat ditambahkan dengan belanja yang diperhitungkan dari ASB ini.

$$\begin{aligned} \text{Rumus Belanja} &: \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.800.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Semua Belanja didistribusikan dalam Belanja Makanan dan Minuman.

ASB018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Terdapat dua unsur dalam ASB ini yaitu rapat koordinasi dan konsultasi. Rapat koordinasi berkaitan kumpulan orang, dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Konsultasi berkaitan dengan pihak yang dipandang lebih mengetahui tentang suatu aturan, kebijakan atau visi strategis tertentu.

$$\begin{aligned} \text{Rumus Belanja} &: \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 16.800.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Semua Belanja didistribusikan dalam Belanja Perjalanan Dinas.

ASB019 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan capaian kinerja atau sejenisnya dan ikhtisar realisasi kinerja dari suatu organisasi yang menjalankan tugas utama dan merupakan organisasi induk dalam pemerintah daerah. Kegiatan ini mengakomodasi berbagai laporan kinerja yang dipersyaratkan untuk dilaporkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan OPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks OPD.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.457.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS, Non PNS, dan Lembur	29,41%	54,23%	79,05%
Belanja Bahan Pakai Habis, Bahan/ Material, dan Cetak dan Penggandaan	14,24%	37,73%	61,23%
Belanja Makanan dan Minuman, Transportasi dan Perjalanan Dinas	0,51%	7,14%	13,78%
Sewa, Jasa Kantor, Narasumber	0,00%	0,90%	1,79%

ASB020 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan keuangan semesteran. Laporan ini adalah laporan perkembangan. Dengan demikian laporan ini berbeda dengan laporan keuangan final. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan OPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks OPD.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$

✓

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dalam obyek belanja : Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan, Honorarium PNS, dan Belanja Makanan dan Minuman dengan batasan yang belum ditentukan. Jika diperlukan, belanja perjalanan dinas bisa dianggarkan di luar ketentuan distribusi belanja di atas.

ASB021 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan prognosis realisasi anggaran. Laporan ini adalah laporan perkembangan. Dengan demikian laporan ini berbeda dengan laporan kinerja final dan mengungkapkan pencapaian realisasi anggaran sejauh pada saat pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selanjutnya mengikuti tingkatan OPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks OPD.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi})$

$$= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dalam obyek belanja: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan, Honorarium PNS, dan Belanja Makanan dan Minuman dengan batasan yang belum ditentukan. Jika diperlukan, belanja perjalanan dinas bisa dianggarkan di luar ketentuan distribusi belanja di atas.

ASB022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan keuangan akhir tahun. Laporan ini adalah laporan final. Dengan demikian laporan ini telah menggambarkan keseluruhan kondisi dan situasi keuangan yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan beserta pencapaiannya. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selanjutnya mengikuti tingkatan OPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks OPD.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi})$

$$= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.457.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Uang Lembur	29,80%	54,59%	79,38%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Cetak/ Penggandaan/Dokumentasi	15,58%	39,48%	63,37%
Belanja Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas	0,33%	5,75%	11,17%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Penceramah dan sejenisnya	0,00%	0,19%	0,37%

ASB023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas rumah jabatan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan/Material	87,02%	93,28%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	6,72%	12,98%

ASB024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas rumah dinas.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan} \times \text{Nilai Aset yang Dipelihara})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.

ASB025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas gedung kantor.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

ASB026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Aset Daerah Lainnya

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas gedung atau aset daerah lainnya yang bukan merupakan gedung kantor. Gedung ini mungkin merupakan fasilitas publik atau sasana atau stadion yang tidak berada di lingkungan kantor.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Aset Daerah Lainnya})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Aset Daerah Lainnya})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung/aset daerah lainnya.

ASB027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas kendaraan yang digunakan oleh pejabat.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan/Mobil Jabatan})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan/Mobil Jabatan})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

ASB028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas kendaraan dinas/operasional.

4

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

ASB029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas *meubeleur* dari suatu organisasi termasuk yang berada dalam tanggungannya.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala *mebeleur*.

ASB030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas perlengkapan rumah jabatan/dinas.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas.

ASB031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas peralatan rumah jabatan dinas.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Dinas})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Dinas})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas.

✓

ASB032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas peralatan gedung kantor.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

ASB033 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas perlengkapan gedung kantor.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

ASB034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan rutin/berkala atas jalan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Jalan})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Jalan})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan jalan.

ASB035 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan rutin/berkala atas jembatan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Jembatan})$

= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Jembatan})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan jembatan.

2

ASB036 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Air

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan rutin/berkala atas bangunan air.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Bangunan Air})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Bangunan Air})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan atas bangunan air.

ASB037 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan rutin/berkala atas instalasi.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan atas instalasi.

ASB038 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Irigasi

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan rutin/berkala atas jaringan irigasi.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Irigasi})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Irigasi})$

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan atas jaringan irigasi.

ASB039 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas rumah jabatan. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan})$

2

ASB040 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas rumah dinas. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas})$

ASB041 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas gedung kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor})$

ASB042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Aset Daerah Lainnya

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas gedung atau aset daerah lainnya yang bukan merupakan gedung kantor. Gedung ini mungkin merupakan fasilitas publik atau sasana atau stadion yang tidak berada di lingkungan kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Aset Daerah Lainnya})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Aset Daerah Lainnya})$

ASB043 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas kendaraan yang digunakan oleh pejabat. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan/Mobil Jabatan})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan/Mobil Jabatan})$

ASB044 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas kendaraan dinas/operasional. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional})$

ASB045 Rehabilitasi Sedang/Berat Mebeleur

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas *mebeleur* dari suatu organisasi termasuk yang berada dalam tanggungannya. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Mebeleur})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Mebeleur})$

ASB046 Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan rumah jabatan/dinas

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas perlengkapan rumah jabatan/dinas. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas})$

ASB047 Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Rumah Jabatan/dinas

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas peralatan rumah jabatan/dinas. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas})$

ASB048 Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Gedung Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas peralatan gedung kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Gedung Kantor})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Gedung Kantor})$

✓

ASB049 Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan Gedung Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas perlengkapan gedung kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan Gedung Kantor})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan Gedung Kantor})$

ASB050 Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas jalan. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan})$

ASB051 Rehabilitasi Sedang/Berat Jembatan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas jembatan. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Jembatan})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Jembatan})$

ASB052 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Air

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas bangunan air. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Air})$
= $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Air})$

ASB053 Rehabilitasi Sedang/Berat Instalasi

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas instalasi. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Instalasi)
= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Instalasi)

ASB054 Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Irigasi

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas jaringan irigasi. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Irigasi)
= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Irigasi)

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Indeks Kinerja Organisasi

Daftar Isi

ASB001: Penyediaan Jasa Surat-menyurat.....	1
ASB002: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.....	2
ASB003: Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.....	3
ASB004: Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.....	4
ASB005: Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	5
ASB006: Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.....	6
ASB007: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7
ASB008: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8
ASB009: Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.....	9
ASB010: Penyediaan Alat Tulis Kantor	10
ASB011: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.....	11
ASB012: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12
ASB013: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.....	13
ASB014: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14
ASB015: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.....	15
ASB016: Penyediaan Bahan Logistik Kantor.....	16
ASB017: Penyediaan Makanan dan Minuman.....	17
ASB018: Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	18
ASB019: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19
ASB020: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.....	20
ASB021: Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	21
ASB022: Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	22

ASB001: Penyediaan Jasa Surat-menyurat

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan	1,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,50
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	2,19
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	Inspektorat	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
24	Kecamatan Adiluwih	0,00
25	Kecamatan Ambarawa	0,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	0,00
29	Kecamatan Pagelaran Utara	0,00
30	Kecamatan Pardasuka	0,00
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
38	Dinas Sosial	0,00

ASB002: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16,75
2	Badan Pendapatan Daerah	21,88
3	Dinas Kesehatan	18,66
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27,13
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,75
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata	3,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	19,42
9	Dinas Ketahanan Pangan	2,75
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	9,81
12	Dinas Lingkungan Hidup	6,75
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13,75
14	Dinas Perikanan	5,75
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	12,50
16	Dinas Perhubungan	8,75
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,00
18	Inspektorat	17,50
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,88
20	Satuan Polisi Pamong Praja	9,00
21	Sekretariat Daerah	200,46
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52,50
24	Kecamatan Adiluwih	1,13
25	Kecamatan Ambarawa	1,00
26	Kecamatan Banyumas	1,50
27	Kecamatan Gading Rejo	1,50
28	Kecamatan Pagelaran	1,63
29	Kecamatan Pagelaran Utara	1,50
30	Kecamatan Pardasuka	3,00
31	Kecamatan Pringsewu	2,50
32	Kecamatan Sukoharjo	2,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,00
34	Dinas Pertanian	13,38
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	5,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	27,75
38	Dinas Sosial	2,83

ASB003: Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	0,00
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	0,00
11	Perindustrian	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,67
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	Inspektorat	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
1	Sekretariat Daerah	262,33
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45,95
24	Kecamatan Adiluwih	9,93
25	Kecamatan Ambarawa	7,33
26	Kecamatan Banyumas	6,33
27	Kecamatan Gading Rejo	1,00
28	Kecamatan Pagelaran	5,50
29	Kecamatan Pagelaran Utara	12,40
30	Kecamatan Pardasuka	0,00
31	Kecamatan Pringsewu	22,27
32	Kecamatan Sukoharjo	6,17
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8,80
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
38	Dinas Sosial	7,20

ASB004: Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	inspektorat	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
24	Kecamatan Adiluwih	0,00
25	Kecamatan Ambarawa	0,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	0,00
29	Kecamatan Pagelaran Utara	0,00
30	Kecamatan Pardasuka	0,00
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
38	Dinas Sosial	0,00

ASB005: Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	Inspektorat	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
24	Kecamatan Adiluwih	0,00
25	Kecamatan Ambarawa	0,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	0,00
29	Kecamatan Pagelaran Utara	0,00
30	Kecamatan Pardasuka	0,00
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
38	Dinas Sosial	0,00

ASB006: Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	Inspektorat	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
24	Kecamatan Adiluwih	0,00
25	Kecamatan Ambarawa	0,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	0,00
29	Kecamatan Pageiaran Utara	0,00
30	Kecamatan Pardasuka	0,00
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
38	Dinas Sosial	0,00

ASB007: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,14
2	Badan Pendapatan Daerah	3,01
3	Dinas Kesehatan	4,84
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,81
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59,08
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,69
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2,35
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,16
9	Dinas Ketahanan Pangan	2,13
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,16
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	3,07
12	Dinas Lingkungan Hidup	2,34
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,25
14	Dinas Perikanan	1,80
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5,23
16	Dinas Perhubungan	2,12
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,46
18	Inspektorat	2,43
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,22
20	Satuan Polisi Pamong Praja	1,90
21	Sekretariat Daerah	12,89
22	Sekretariat Dewan KORPRI	1,11
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4,25
24	Kecamatan Adiluwih	1,09
25	Kecamatan Ambarawa	1,06
26	Kecamatan Banyumas	1,05
27	Kecamatan Gading Rejo	1,06
28	Kecamatan Pagelaran	1,00
29	Kecamatan Pagelaran Utara	1,12
30	Kecamatan Pardasuka	1,04
31	Kecamatan Pringsewu	1,24
32	Kecamatan Sukoharjo	1,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,73
34	Dinas Pertanian	3,19
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	1,64
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,58
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16,57
38	Dinas Sosial	1,61

ASB008: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,55
2	Badan Pendapatan Daerah	7,55
3	Dinas Kesehatan	7,55
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,51
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15,15
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,62
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3,77
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9,34
9	Dinas Ketahanan Pangan	2,26
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,41
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	7,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	3,77
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,67
14	Dinas Perikanan	3,77
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,26
16	Dinas Perhubungan	3,77
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,46
18	Inspektorat	6,34
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,51
20	Satuan Polisi Pamong Praja	2,97
21	Sekretariat Daerah	46,52
22	Sekretariat Dewan KORPRI	1,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	219,33
24	Kecamatan Adituwih	9,21
25	Kecamatan Ambarawa	7,23
26	Kecamatan Banyumas	7,69
27	Kecamatan Gading Rejo	2,88
28	Kecamatan Pagelaran	3,82
29	Kecamatan Pagelaran Utara	7,46
30	Kecamatan Pardasuka	3,89
31	Kecamatan Pringsewu	24,91
32	Kecamatan Sukoharjo	3,34
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,04
34	Dinas Pertanian	3,77
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	3,77
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,64
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4,70
38	Dinas Sosial	3,02

ASB009: Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan	2,22
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,52
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,89
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1,88
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,44
9	Dinas Ketahanan Pangan	2,50
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	1,11
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,22
16	Dinas Perhubungan	3,18
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	Inspektorat	5,33
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	19,44
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20,69
24	Kecamatan Adiluwih	1,33
25	Kecamatan Ambarawa	1,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	1,28
29	Kecamatan Pagelaran Utara	1,84
30	Kecamatan Pardasuka	1,82
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	1,11
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	2,80
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5,60
38	Dinas Sosial	0,00

ASB010: Penyediaan Alat Tulis Kantor

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,02
2	Badan Pendapatan Daerah	13,52
3	Dinas Kesehatan	5,52
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,61
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15,85
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,53
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4,79
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5,96
9	Dinas Ketahanan Pangan	3,17
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	4,48
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	5,59
12	Dinas Lingkungan Hidup	8,19
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,76
14	Dinas Perikanan	3,58
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6,74
16	Dinas Perhubungan	3,68
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,56
18	Inspektorat	13,15
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	2,10
21	Sekretariat Daerah	31,21
22	Sekretariat Dewan KORPRI	3,17
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13,94
24	Kecamatan Adiluwih	2,55
25	Kecamatan Ambarawa	2,55
26	Kecamatan Banyumas	2,80
27	Kecamatan Gading Rejo	3,11
28	Kecamatan Pagejaran	3,65
29	Kecamatan Pagejaran Utara	4,74
30	Kecamatan Pardasuka	2,08
31	Kecamatan Pringsewu	5,15
32	Kecamatan Sukoharjo	3,81
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,45
34	Dinas Pertanian	9,96
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	4,93
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,69
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9,67
38	Dinas Sosial	6,49

ASB011: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,00
2	Badan Pendapatan Daerah	12,91
3	Dinas Kesehatan	17,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7,20
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,03
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata	3,91
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9,17
9	Dinas Ketahanan Pangan	2,25
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,18
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	14,99
12	Dinas Lingkungan Hidup	8,96
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11,05
14	Dinas Perikanan	2,65
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,89
16	Dinas Perhubungan	9,07
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,49
18	Inspektorat	11,26
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	102,53
22	Sekretariat Dewan KORPRI	1,92
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	112,49
24	Kecamatan Adiluwih	3,39
25	Kecamatan Ambarawa	4,96
26	Kecamatan Banyumas	3,77
27	Kecamatan Gading Rejo	2,16
28	Kecamatan Pagelaran	2,16
29	Kecamatan Pagelaran Utara	3,20
30	Kecamatan Pardasuka	2,66
31	Kecamatan Pringsewu	8,13
32	Kecamatan Sukoharjo	2,08
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,57
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	6,29
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,90
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1,36
38	Dinas Sosial	2,86

ASB012: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,81
2	Badan Pendapatan Daerah	6,81
3	Dinas Kesehatan	768,41
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,94
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6,82
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,15
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2,18
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,62
9	Dinas Ketahanan Pangan	2,04
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,94
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	2,52
12	Dinas Lingkungan Hidup	3,40
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,35
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,40
16	Dinas Perhubungan	3,34
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,00
18	Inspektorat	4,77
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,36
20	Satuan Polisi Pamong Praja	2,04
21	Sekretariat Daerah	61,76
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	43,80
24	Kecamatan Adiluwih	4,54
25	Kecamatan Ambarawa	5,75
26	Kecamatan Banyumas	3,37
27	Kecamatan Gading Rejo	4,65
28	Kecamatan Pagelaran	2,54
29	Kecamatan Pagelaran Utara	5,09
30	Kecamatan Pardasuka	2,34
31	Kecamatan Pringsewu	22,81
32	Kecamatan Sukoharjo	3,04
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,43
34	Dinas Pertanian	22,16
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	3,40
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,59
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2,25
38	Dinas Sosial	2,04

ASB013: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	Inspektorat	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	7,92
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
24	Kecamatan Adluwih	0,00
25	Kecamatan Ambarawa	0,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	0,00
29	Kecamatan Pagelaran Utara	0,00
30	Kecamatan Pardasuka	7,40
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	1,41
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	34,66
38	Dinas Sosial	1,00

ASB014: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	Inspektorat	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1,00
24	Kecamatan Adiluwih	0,00
25	Kecamatan Ambarawa	0,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	0,00
29	Kecamatan Pagelaran Utara	0,00
30	Kecamatan Pardasuka	0,00
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
38	Dinas Sosial	0,00

ASB015: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,33
2	Badan Pendapatan Daerah	5,53
3	Dinas Kesehatan	5,55
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,56
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5,56
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,89
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5,52
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5,56
9	Dinas Ketahanan Pangan	3,31
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,60
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	5,56
12	Dinas Lingkungan Hidup	5,56
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,44
14	Dinas Perikanan	5,49
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5,47
16	Dinas Perhubungan	4,60
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,55
18	Inspektorat	5,50
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5,53
20	Satuan Polisi Pamong Praja	5,56
21	Sekretariat Daerah	0,00
22	Sekretariat Dewan KORPRI	3,60
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	176,60
24	Kecamatan Adiluwih	1,07
25	Kecamatan Ambarawa	1,00
26	Kecamatan Banyumas	1,49
27	Kecamatan Gading Rejo	1,60
28	Kecamatan Pagelaran	2,13
29	Kecamatan Pagelaran Utara	1,60
30	Kecamatan Pardasuka	1,60
31	Kecamatan Pringsewu	3,33
32	Kecamatan Sukoharjo	2,13
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,55
34	Dinas Pertanian	6,67
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	5,56
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,33
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5,53
38	Dinas Sosial	5,55

ASB016: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	Inspektorat	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
24	Kecamatan Adlluwih	0,00
25	Kecamatan Ambarawa	0,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	0,00
29	Kecamatan Pagelaran Utara	0,00
30	Kecamatan Pardasuka	0,00
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
38	Dinas Sosial	0,00

ASB017: Penyediaan Makanan dan Minuman

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,51
2	Badan Pendapatan Daerah	19,44
3	Dinas Kesehatan	17,42
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	63,38
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27,78
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,45
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3,29
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,33
9	Dinas Ketahanan Pangan	1,73
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,37
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	5,27
12	Dinas Lingkungan Hidup	6,78
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	5,55
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	11,20
16	Dinas Perhubungan	5,90
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,00
18	Inspektorat	13,33
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2,78
20	Satuan Polisi Pamong Praja	9,89
21	Sekretariat Daerah	401,11
22	Sekretariat Dewan KORPRI	2,96
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	144,17
24	Kecamatan Adiluwih	13,78
25	Kecamatan Ambarawa	19,44
26	Kecamatan Banyumas	17,16
27	Kecamatan Gading Rejo	8,25
28	Kecamatan Pagelaran	19,44
29	Kecamatan Pagelaran Utara	12,36
30	Kecamatan Pardasuka	14,67
31	Kecamatan Pringsewu	20,00
32	Kecamatan Sukoharjo	19,21
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	5,33
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	18,76
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,88
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
38	Dinas Sosial	0,00

ASB018: Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70,48
2	Badan Pendapatan Daerah	13,25
3	Dinas Kesehatan	22,89
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22,66
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10,33
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50,73
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1,69
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,99
9	Dinas Ketahanan Pangan	10,48
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	26,89
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	17,58
12	Dinas Lingkungan Hidup	13,18
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25,28
14	Dinas Perikanan	5,09
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	10,14
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,71
18	Inspektorat	26,23
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5,80
20	Satuan Polisi Pamong Praja	3,55
21	Sekretariat Daerah	80,28
22	Sekretariat Dewan KORPRI	3,27
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19,62
24	Kecamatan Adiluwih	2,05
25	Kecamatan Ambarawa	2,03
26	Kecamatan Banyumas	2,64
27	Kecamatan Gading Rejo	3,77
28	Kecamatan Pagelaran	4,45
29	Kecamatan Pagelaran Utara	1,92
30	Kecamatan Pardasuka	2,94
31	Kecamatan Pringsewu	1,00
32	Kecamatan Sukoharjo	3,54
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11,07
34	Dinas Pertanian	4,85
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	31,95
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,42
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22,85
38	Dinas Sosial	23,18

ASB019: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,14
2	Badan Pendapatan Daerah	7,51
3	Dinas Kesehatan	23,18
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6,86
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24,48
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,33
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	8,01
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,44
9	Dinas Ketahanan Pangan	2,44
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,06
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	10,03
12	Dinas Lingkungan Hidup	6,50
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,86
14	Dinas Perikanan	5,79
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	16,03
16	Dinas Perhubungan	6,93
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,73
18	Inspektorat	10,30
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10,30
20	Satuan Polisi Pamong Praja	10,21
21	Sekretariat Daerah	40,53
22	Sekretariat Dewan KORPRI	9,27
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10,30
24	Kecamatan Adiluwih	1,81
25	Kecamatan Ambarawa	1,00
26	Kecamatan Banyumas	6,62
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	3,28
29	Kecamatan Pagelaran Utara	2,81
30	Kecamatan Pardasuka	7,63
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,43
34	Dinas Pertanian	13,96
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	6,86
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8,89
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3,99
38	Dinas Sosial	8,21

ASB020: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	Inspektorat	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
24	Kecamatan Adiluwih	0,00
25	Kecamatan Ambarawa	0,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	0,00
29	Kecamatan Pagelaran Utara	0,00
30	Kecamatan Pardasuka	0,00
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
38	Dinas Sosial	0,00

ASB021: Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
14	Dinas Perikanan	0,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
18	Inspektorat	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00
22	Sekretariat Dewan KORPRI	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
24	Kecamatan Adiluwih	0,00
25	Kecamatan Ambarawa	0,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	0,00
29	Kecamatan Pagelaran Utara	0,00
30	Kecamatan Pardasuka	0,00
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
34	Dinas Pertanian	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
38	Dinas Sosial	0,00

ASB022: Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

No.	SKPD	Indeks
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,43
2	Badan Pendapatan Daerah	7,12
3	Dinas Kesehatan	33,30
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,43
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12,11
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3,33
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,46
9	Dinas Ketahanan Pangan	1,91
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,95
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	
11	Perindustrian	4,10
12	Dinas Lingkungan Hidup	4,58
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,43
14	Dinas Perikanan	2,75
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6,86
16	Dinas Perhubungan	3,43
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,24
18	Inspektorat	7,22
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3,43
20	Satuan Polisi Pamong Praja	4,13
21	Sekretariat Daerah	22,77
22	Sekretariat Dewan KORPRI	10,64
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21,11
24	Kecamatan Adlluwih	1,30
25	Kecamatan Ambarawa	1,00
26	Kecamatan Banyumas	0,00
27	Kecamatan Gading Rejo	0,00
28	Kecamatan Pagelaran	0,00
29	Kecamatan Pagelaran Utara	2,71
30	Kecamatan Pardasuka	0,00
31	Kecamatan Pringsewu	0,00
32	Kecamatan Sukoharjo	5,48
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,43
34	Dinas Pertanian	3,43
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	3,43
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2,96
38	Dinas Sosial	5,13